**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERBUKUAN NASIONAL**

| **NO** | **NASKAH DPR** | **TANGGAPAN PEMERINTAH** | **KETERANGAN** | **CATATAN**  **NARA SUMBER** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RANCANGAN UNDANG – UNDANG  NOMOR… TAHUN…  TENTANG  SISTEM PERBUKUAN | RANCANGAN UNDANG – UNDANG  NOMOR… TAHUN…  TENTANG  SISTEM PERBUKUAN NASIONAL | Untuk menunjukkan bahwa Sistem ini berlaku secara Nasional |  |
|  | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, | Tetap |  |  |
|  | Menimbang:   1. bahwa membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan melalui buku merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | Menimbang:   1. bahwa membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan Buku merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | Perubahan redaksional |  |
|  |  | 1. bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia di berbagai bidang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk berperan dalam tingkat global; | Penambahan substansi |  |
|  | 1. bahwa harga, mutu, jenis, ketersediaan, dan pemanfaatan buku saat ini menjadi kendala dalam tata kelola perbukuan sehingga diperlukan sistem perbukuan secara terpadu; | 1. bahwa untuk menjamin ketersediaan, akses, mutu, keterjangkauan, kemanfaatan,dan tata kelola Buku diperlukan pengaturan sistem perbukuan secara nasional; | Perbaikan redaksional.  Sistem Perbukuan diganti menjadi Sistem Perbukuan Nasional |  |
|  | 1. bahwa pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu pengaturan perbukuan; | Tetap | Perubahan nomor menjadi huruf d |  |
|  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan; | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan Nasional; | Sistem Perbukuan diganti menjadi Sistem Perbukuan Nasional |  |
|  | Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | Tetap |  |  |
|  | Dengan persetujuan bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  dan  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  MEMUTUSKAN:  Menetapkan: UNDANG–UNDANG TENTANG SISTEM PERBUKUAN. | Dengan persetujuan bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  dan  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  MEMUTUSKAN:  Menetapkan: UNDANG–UNDANG TENTANG  SISTEM PERBUKUAN NASIONAL. | Konsistensi dengan DIM Nomor 1 |  |
|  | BAB I  KETENTUAN UMUM | Tetap |  |  |
|  | Pasal 1 | Tetap |  |  |
|  | Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: | Tetap |  |  |
|  | 1. Sistem Perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang saling terkait secara terpadu yang meliputi penulisan naskah, pencetakan atau digitalisasi, penerbitan, pendistribusian, penggunaan, dan pengadaan. | 1. Sistem Perbukuan Nasional adalah keseluruhan komponen tata kelola perbukuan yang saling terkait secara terpadu yang mencakup penulisan naskah, pencetakan atau digitalisasi, penerbitan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, penghargaan, pelindungan, pengawasan, dan evaluasi. | Sistem Perbukuan diganti menjadi Sistem Perbukuan Nasional.  Penambahan substansi penghargaan, pelindungan, pengawasan dan evaluasi. |  |
|  | 1. Buku adalah publikasi dalam bentuk cetak dan/atau digital terdiri dari lembaran-lembaran barupa teks, gambar, audio, atau video atau gabungan dari semuanya yang diterbitkan tidak berkala secara nasional maupun internasional. | 1. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang dijilid, bersampul,dan digandakan dalam bentuk cetak dan/atau eletronikserta diterbitkan tidak berkala dan menjunjung tinggi nilai-nilai universal. | Perubahan substansi |  |
|  |  | 1. Buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama mengacu pada kurikulum yang berlaku dan dinyatakan layak oleh Kementerian untuk digunakan pada satuan pendidikan. | Penambahan substansi |  |
|  | 1. Buku Umum adalah Buku yang memuat sumber informasi tentang pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, baik fiksi maupun nonfiksi. | Hapus | Tidak ada klasifikasi buku umum dan buku pendidikan dalam Undang-Undang (usul perubahan pada Pasal 5) |  |
|  | 1. Buku Pendidikan adalah Buku yang memuat sumber informasi pembelajaran dan/atau pendidikan sesuai dengan standar isi. | Hapus |  |  |
|  |  | 4a. Insan perbukuan adalah pelaku tata kelola perbukuan yang terdiri atas Penulis, Penerjemah, Penyadur, Ilustrator, Penerbit, Percetakan atau Usaha Digitalisasi, dan Distributor. | Penambahan Substansi |  |
|  | 1. Penulis adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang menulis naskah untuk diterbitkan dalam bentuk Buku. | Tetap |  |  |
|  | 1. Terjemahan adalah hasil pengalihbahasaan buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks. | Tetap |  |  |
|  | 1. Penerjemah adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melakukan penterjemahan | Tetap |  |  |
|  | 1. Saduran adalah hasil gubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama-nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian. | Tetap |  |  |
|  | 1. Penyadur adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melakukan saduran. | Tetap |  |  |
|  | 1. Perancang Grafis adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang membuat ilustrasi dan perancangan tata letak buku. | Hapus | Disesuai dengan substansi UU 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. |  |
|  | 1. Ilustrator adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang membuat ilustrasi buku. | Tetap |  |  |
|  | 1. Perancang Tata Letak adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang merancang tata letak naskah buku menjadi buku lengkap. | Hapus | Sudah masuk dalam DIM 21 (perancang grafis) |  |
|  | 1. Ilustrasi adalah karya dalam bentuk gambar, sketsa dan/atau peta untuk memperkaya, mempermudah, atau memperjelas uraian dalam sebuah buku. | Tetap | Penambahan substansi |  |
|  | 1. Suntingan adalah hasil penataan bahasa untuk memperjelas isi naskah buku. | Hapus | Substansi tidak terdapat dalam batang tubuh |  |
|  | 1. Penyunting adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melakukan suntingan. | Hapus |  |  |
|  | 1. Pembaca Ahli adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang bertugas memeriksa substansi naskah buku cetak coba sesuai dengan keahlian atau kepakarannya. | Hapus | Substansi tidak terdapat dalam batang tubuh |  |
|  | 1. Korektor adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang bertugas memperbaiki kesalahan tulis pada naskah buku cetak coba. | Hapus | Substansi tidak terdapat dalam batang tubuh |  |
|  | 1. Penerbitan adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengadaan naskah, penyuntingan, perancangan tata letak, pencetakan atau digitalisasi naskah dan pendistribusian buku. | Tetap |  |  |
|  | 1. Penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan buku. | Tetap |  |  |
|  | 1. Percetakan adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan pencetakan. | Tetap |  |  |
|  | 1. Pencetakan adalah proses mencetak buku mulai dari cetak coba sampai menjadi buku. | 1. Pencetakan adalah proses mencetak naskah buku mulai dari cetak coba sampai menjadi buku. | Perbaikan redaksional |  |
|  | 1. Digitalisasi adalah proses memindahkan naskah buku ke dalam bentuk digital. | 1. Digitalisasi adalah proses mengubah dan/atau mengolah dari bentuk teks menjadi buku yang lebih kaya dalam bentuk buku elektronik. | Perbaikan redaksional |  |
|  | 1. Distributor adalah lembaga pemerintahatau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan pendistribusian buku. | 1. Distributor adalah perseorangan, lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan pendistribusian buku | Perbaikan redaksional |  |
|  | 1. Pendistribusian adalah rangkaian kegiatan penyebaran buku untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dari penerbit sampai kepada pengguna. | 1. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran buku dari penerbit sampai kepada pengguna. | Perbaikan redaksional |  |
|  | 1. Penggunaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan buku. | Tetap |  |  |
|  | 1. Pengadaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan buku. | Tetap |  |  |
|  | 1. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, dan/atau badan usaha. | Hapus | Cukup jelas |  |
|  |  | 27a. Pengawasan adalah suatu pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan berjalan baik dan benar sesuai dengan rencana dan aturan yang telah ditentukan, baik terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan. | Penambahan substansional |  |
|  | 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | Penambahan substansi  “Wakil Presiden dan menteri” |  |
|  | 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. | 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | Perubahan substansi |  |
|  | 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. | 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. | Penambahan substansi “dan kebudayaan” |  |
|  | Pasal 2 | Tetap |  |  |
|  | Penyelenggaraan Sistem Perbukuan berasaskan: | Sistem Perbukuan Nasional berasaskan: | Sistem Perbukuan diganti menjadi Sistem Perbukuan Nasional |  |
|  | 1. kebhinekaan; | a.kebhinnekaan; | Perbaikan redaksional |  |
|  | 1. kebangsaaan; | Tetap |  |  |
|  | 1. kebersamaan; | 1. profesionalisme; | Memperbaiki rumusan dan urutan |  |
|  | 1. keterpaduan; | Tetap |  |  |
|  | 1. profesionalitas; | 1. kenusantaraan; | Perbaikan urutan |  |
|  | 1. kenusantaraan; | 1. keadilan; | Perbaikan urutan |  |
|  | 1. keadilan; dan | 1. partisipasi masyarakat; | Perbaikan urutan |  |
|  | 1. partisipasi masyarakat. | 1. kebersamaan; | Perbaikan urutan |  |
|  |  | 1. gotong royong; dan | Penambahan substansi |  |
|  |  | 1. bebas bias. | Penambahan substansi |  |
|  | Pasal 3 | Tetap |  |  |
|  | Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan: | Sistem Perbukuan Nasional bertujuan: | Sistem Perbukuan diganti menjadi Sistem Perbukuan Nasional |  |
| 1. N | * 1. mengatur tata kelola perbukuan yang menghasilkan buku bermutu yang mampu mencerdaskan dan membangun integritas kehidupan bangsa; | * + - * 1. mengatur tata kelola perbukuan untuk menghasilkan buku bermutu yang mampu mencerdaskan dan membangun integritas kehidupan bangsa | Perbaikan redaksional |  |
|  | * 1. memperkuat rasa cinta tanah air dan terbangunnya karakter bangsa; | Tetap |  |  |
|  | * 1. memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh buku; | Tetap |  |  |
|  | * 1. menumbuhkan budaya minat baca masyarakat; | 1. menumbuhkan minat dan budaya membaca dan budaya menulis masyarakat; | Penambahan substansi  “budaya menulis” |  |
|  | 1. mewujudkan tata kelola perbukuan yang sehat, kuat, dinamis, berkualitas, berdaya saing, dan terpadu; | Tetap |  |  |
|  | 1. meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan; | Tetap |  |  |
|  | 1. meningkatkan mutu dan jumlah buku yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat indonesia; | 1. meningkatkan mutu dan jumlah Buku yang diterbitkan; | Perbaikan redaksional |  |
|  | 1. meningkatkan ketersediaan dan pendistribusian buku secara merata dengan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat; | Tetap |  |  |
|  | 1. meningkatkan pemanfaatan buku sebagai sumber belajar dan sarana memperluas wawasan pengetahuan; dan | Tetap |  |  |
|  | 1. meningkatkan martabat dan jati diri bangsa melalui industri perbukuan tingkat lokal dan nasional. | 1. meningkatkan martabat dan membangun karakter serta jati diri bangsa melalui upaya pembinaan industri perbukuan tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. | Penambahan substansi |  |
|  |  | 1. Memotivasi penulis buku untuk berkarya secara profesional. | Penambahan substansi |  |
|  | BAB II  BENTUK DAN JENIS BUKU | BAB II  ISI DAN BENTUK BUKU | Penambahan substansi |  |
|  |  | Pasal 4a | Usulan pasal tambahan tentang isi buku. |  |
|  |  | (1)Buku berisi berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. | Usulan penambahan materi terkait dengan substansi isi buku |  |
|  |  | (2) Isi Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menumbuhkembangkan nilai-nilai universal, kecerdasan dan integritas kehidupan berbangsa. |  |  |
|  |  | (3) Ketentuan lebih lanjut tentang isi buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. |  |  |
|  | Pasal 4 | Tetap |  |  |
|  | Bentuk Buku terdiri atas: | Tetap |  |  |
|  | 1. cetak; dan | 1. Buku cetak; dan | Buku cetak termasuk Braille |  |
|  | 1. digital. | 1. Buku elektronik. | *Yang benar adalah buku elektronik (An electronic book)* |  |
|  | Pasal 5 | Hapus |  |  |
|  | 1. Jenis Buku terdiri atas Buku Umum dan Buku Pendidikan. | Hapus | diatur dalam Peraturan Menteri |  |
|  | 1. Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | Hapus |  |  |
|  | * 1. buku pengetahuan umum; | Hapus |  |  |
|  | * 1. buku agama; | Hapus |  |  |
|  | * 1. buku komik; | Hapus |  |  |
|  | * 1. buku cerita fiksi dan non-fiksi; | Hapus |  |  |
|  | * 1. buku sumber; | Hapus |  |  |
|  | * 1. buku pengetahuan praktis; dan | Hapus |  |  |
|  | * 1. buku hiburan. | Hapus |  |  |
|  | 1. Buku Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | Hapus |  |  |
|  | * 1. buku teks; | Hapus |  |  |
|  | * 1. buku pengayaan; | Hapus |  |  |
|  | * 1. buku referensi; dan | Hapus |  |
|  | * 1. buku panduan pendidik. | Hapus |  |
|  | BAB III  HAK DAN KEWAJIBAN  Bagian Kesatu  Masyarakat | Tetap |  |  |
|  | Pasal 6 | Tetap |  |  |
|  | Masyarakat berhak memperoleh: | Tetap |  |  |
|  | * 1. kemudahan akses terhadap buku bermutu sesuai dengan kebutuhan pada satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi dengan tingkat harga yang terjangkau; | 1. kemudahan akses terhadap buku bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau; | Penambahan substansi  harga terjangkau |  |
|  | * 1. buku teks bermutu pada satuan pendidikan dasar sesuai dengan kebutuhan tanpa dipungut biaya; dan | Hapus | diatur dalam Peraturan Presiden |  |
|  | * 1. informasi perbukuan dan kemudahan untuk mendapatkan buku sesuai dengan kebutuhan. | 1. kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan sistem perbukuan nasional. | Perubahan substansi |  |
|  | Pasal 7 | Tetap |  |  |
|  | Masyarakat yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh kemudahan membaca Buku sesuai dengan kebutuhannya melalui fasilitas umum yang disediakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. | Masyarakat yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh kemudahan membaca Buku sesuai dengan kebutuhannya melalui fasilitas umum yang disediakan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. | Perbaikan redaksional |  |
|  | Pasal 8 | Tetap |  |  |
|  | Masyarakat di daerah terpencil, terpencar, terluar, komunitas adat terpencil, serta yang mengalami bencana alam, dan bencana sosial berhak memperoleh layanan akses dan/atau Buku sesuai dengan kebutuhannya dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. | Masyarakat di daerah terpencil atau terbelakang,masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi berhak memperoleh layanan akses dan/atau Buku sesuai dengan kebutuhannya dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat | Perbaikan redaksional |  |
|  | Pasal 9 | Tetap |  |  |
|  | Masyarakat berkewajiban: | Tetap |  |  |
|  | * 1. memelihara dan memanfaatkan fasilitas layanan dan buku yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat; dan | a. memanfaatkan dan memelihara fasilitas layanan perbukuan dan Buku yang disediakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat; dan | Perbaikan redaksional |  |
|  | * 1. memberikan dukungan terhadap terciptanya masyarakat belajar, masyarakat gemar membaca, dan masyarakat gemar menulis. | Tetap |  |  |
|  | Bagian Kedua  Penulis | Tetap |  |  |
|  | Pasal 10 | Tetap |  |  |
|  | Penulis berhak: | Tetap |  |  |
|  | * 1. memiliki hak cipta atas naskah hasil karangan atau tulisannya; | Tetap |  |  |
|  | 1. mengalihkan haknya kepada pihak lain; | b. mengalihkan hak cipta atas naskah hasil karangan atau tulisan yang dimilki kepada pihak lain; | Perbaikan substansi dengan penambahan hak cipta atas naskah hasil karangan atau tulisan |  |
|  | 1. menerjemahkan sendiri atau memberi izin atau kuasa untuk menerjemahkan karangan atau tulisannya; | c. mengalihbahasakan sendiri atau memberi izin atau kuasa untuk mengalihbahasakan karangan atau tulisannya; | Perbaikan redaksional |  |
|  | 1. menerima royalti atas lisensi penerbitan dari harga bruto atau honorarium atas penyerahan hak cipta hasil karangan atau tulisannya; dan | d. menerima royalti atas lisensi penerbitan; dan | Perubahan substansi  Pengaturan mengenai pembayaran lisensi diatur dalam perjanjian para pihak. |  |
|  | 1. memperoleh informasi yang akurat, terkini, dan periodik dari penerbit mengenai penjualan bukunya secara terbuka. | e. memperoleh data dan informasi yang akurat, terkini, dari penerbit tentang penjualan Buku. | Diatur dalam Peraturan Menteri. |  |
|  | Pasal 11 | Tetap |  |  |
|  | Penulis berkewajiban: | Tetap |  |  |
|  | 1. mencantumkan nama asli atau samaran pada karangan atau tulisannya; | Hapus | Cukup diatur dalam Peraturan Menteri |  |
|  | 1. mencantumkan nama aslinya dalam surat perjanjian antara penulis dan penerbit apabila menggunakan nama samaran pada karangan atau tulisannya; | Hapus | Cukup diatur dalam Peraturan Menteri |  |
|  | 1. mempertanggungjawabkan hasil karya tulisnya; dan | Tetap |  |  |
|  | 1. tidak melakukan perjanjian ganda atas satu hak cipta yang telah dikerjasamakan. | Tetap |  |  |
|  |  | 1. menjaga etika penulisan. | Rincian b, c, d diatur dalam Peraturan Menteri. |  |
|  | Bagian Ketiga  Penerjemah | Tetap |  |  |
|  | Pasal 12 | Tetap |  |  |
|  | Penerjemah berhak: | Tetap |  |  |
|  | * 1. memiliki hak cipta atas naskah hasil terjemahannya; | Tetap |  |  |
|  | 1. mengalihkan hak penerjemahannya kepada pihak lain; | Tetap |  |  |
|  | 1. menerima royalti atas hasil terjemahannya atau honorarium penyerahan hak cipta atas karya terjemahannya; | c. menerima royalti atas hasil terjemahannya; | Perbaikan redaksional |  |
|  | 1. mendapat perlindungan atas hasil karya terjemahannya; dan | d. mendapat pelindungan hukum atas hasil karya terjemahannya; dan | Perbaikan redaksional |  |
|  | 1. memperoleh informasi yang akurat, terkini, dan periodik dari penerbit tentang penjualan Buku terjemahannya secara terbuka. | Hapus | Perlu diatur dalam Peraturan Menteri. |  |
|  | Pasal 13 | Tetap |  |  |
|  | Penerjemah berkewajiban: | Tetap |  |  |
|  | * 1. memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian; | Tetap |  |  |
|  | 1. mempertanggungjawabkan hasil terjemahannya; dan | Tetap |  |  |
|  | 1. tidak melakukan perjanjian ganda mengenai penerbitan satu naskah hasil terjemahan dengan menggunakan bahasa yang sama. | Tetap |  |  |
|  | Bagian Keempat  Penyadur | Tetap |  |  |
|  | Pasal 14 | Tetap |  |  |
|  | Penyadur berhak: | Tetap |  |  |
|  | 1. memiliki hak cipta atas naskah hasil sadurannya; | Tetap |  |  |
|  | 1. mengalihkan hak penyadurannya kepada pihak lain; | Tetap |  |  |
|  | 1. menerima royalti atas hasil penyadurannya atau tidak menerima hak honorariumnya sesuai dengan perjanjian dengan Penerbit; | Hapus | Cukup diatur dalam Peraturan Menteri. |  |
|  | 1. mendapat perlindungan atas hasil karya sadurannya; dan | 1. mendapat pelindungan hukum atas hasil karya sadurannya; dan | Perbaikan redaksional |  |
|  | 1. memperoleh informasi yang akurat, terkini, dan periodik dari Penerbit tentang penjualan Buku sadurannya secara terbuka. | Hapus | Cukup diatur dalam Peraturan Menteri. |  |
|  | Pasal 15 | Tetap |  |  |
|  | Penyadur berkewajiban: | Tetap |  |  |
|  | * 1. memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian; | Tetap |  |  |
|  | 1. mempertanggungjawabkan hasil sadurannya; dan | Tetap |  |  |
|  | 1. tidak melakukan perjanjian ganda mengenai penerbitan satu naskah hasil saduran dengan menggunakan bahasa yang sama. | Tetap |  |  |
|  | Bagian Kelima  Perancang Grafis | Hapus | ilustrator dan Perancang Tata Letak bukan merupakan perancang grafis |  |
|  | Pasal 16 | Hapus |  |  |
|  | Perancang Grafis terdiri atas ilustrator dan Perancang Tata Letak. | Hapus |  |  |
|  |  | Bagian Kelima A  Ilustrator | Penambahan substansi |  |
|  | Pasal 17 | Tetap |  |  |
|  | Ilustrator berhak: | Tetap |  |  |
|  | 1. memiliki hak cipta atas hasil ilustrasinya dalam bentuk gambar, grafis, dan/atau foto; | Hapus | Cukup diatur dalam Peraturan Menteri. |  |
|  | 1. menerima royalti atas hasil ilustrasinya atau honorarium penyerahan hak cipta atas karya illustrasinya; | Hapus |  |  |
|  | 1. mendapat perlindungan atas hasil karya ilustrasinya; dan | 1. mendapat pelindungan atas hasil karya ilustrasinya; dan | Perbaikan redaksional |  |
|  | 1. memperoleh informasi yang akurat, terkini, dan periodik dari penerbit tentang penjualan buku yang memuat karya ilustrasinya secara terbuka. | Tetap |  |  |
|  | Pasal 18 | Tetap |  |  |
|  | Ilustrator berkewajiban: | Tetap |  |  |
|  | 1. mempertanggungjawabkan hasil pembuatan ilustrasinya; dan | Tetap |  |  |
|  | 1. tidak melakukan perjanjian ganda mengenai penerbitan satu naskah hasil ilustrasinya. | Tetap |  |  |
|  | Pasal 19 | Hapus | Tidak perlu diatur dalam Undang-Undang karena Hak dan Kewajiban tersebut adalah hubungan keperdataan antar pelaku perbukuan |  |
|  | Perancang Tata Letak berhak menerima: | Hapus |  |  |
|  | 1. honorarium atau gaji tetap dari penulis atau penerbit; atau | Hapus |  |  |
|  | 1. persentase royalti dari penulis atau penerbit. | Hapus |  |  |
|  | Pasal 20 | Hapus | Tidak perlu diatur dalam Undang-Undang karena Hak dan Kewajiban tersebut adalah hubungan keperdataan antar pelaku perbukuan |  |
|  | Perancang Tata Letak berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil rancangannya. | Hapus |  |  |
|  | Bagian Keenam  Penyunting | Hapus |  |  |
|  | Pasal 21 | Hapus | Tidak perlu diatur dalam Undang-Undang karena Hak dan Kewajiban tersebut adalah hubungan keperdataan antar pelaku perbukuan |  |
|  | Penyunting berhak menerima: | Hapus |  |  |
|  | 1. honorarium atau gaji tetap dari penulis atau penerbit; atau | Hapus |  |  |
|  | 1. persentase royalti dari penulis atau penerbit. | Hapus |  |  |
|  | Pasal 22 | Hapus | Tidak perlu diatur dalam Undang-Undang karena Hak dan Kewajiban tersebut adalah hubungan keperdataan antar pelaku perbukuan |  |
|  | Penyunting berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil suntingannya. | Hapus |  |  |
|  | Bagian Ketujuh  Pembaca Ahli | Hapus |  |  |
|  | Pasal 23 | Hapus | Tidak perlu diatur dalam Undang-Undang karena Hak dan Kewajiban tersebut adalah hubungan keperdataan antar pelaku perbukuan |  |
|  | Pembaca Ahli berhak menerima: | Hapus |  |
|  | * + - * 1. honorarium dari penulis atau penerbit; | Hapus |  |
|  | * + - * 1. gaji tetap dari penerbit; atau | Hapus |  |
|  | * + - * 1. persentase royalti dari penulis atau penerbit. | Hapus |  |
|  | Pasal 24 | Hapus |  |
|  | Pembaca Ahli berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. | Hapus |  |
|  | Bagian Kedelapan  Korektor | Hapus | Tidak perlu diatur dalam Undang-Undang karena Hak dan Kewajiban tersebut adalah hubungan keperdataan antar pelaku perbukuan |  |
|  | Pasal 25 | Hapus |  |
|  | Korektor berhak menerima: | Hapus |  |
|  | 1. honorarium dari penulis atau penerbit; | Hapus |  |
|  | 1. gaji tetap dari penerbit; atau | Hapus |  |
|  | 1. persentase royalti dari penulis atau penerbit. | Hapus |  |
|  | Pasal 26 | Hapus |  |
|  | Korektor berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. | Hapus |  |
|  | Bagian Kesembilan  Percetakan atau Usaha Digitalisasi | Tetap |  |  |
|  | Pasal 27 | Tetap |  |  |
|  | 1. Percetakan atau Usaha Digitalisasi tidak bertanggungjawab atas isi naskah Buku yang dicetak atau digitalisasi. | Tetap  *Tambahan Penjelasan:*  *Digitalisasi adalah proses mengubah dan/atau mengolah dari bentuk teks menjadi buku yang lebih kaya dalam bentuk buku elektronik.* |  |  |
|  | 1. Percetakan berhak memperoleh kemudahan dalam mendapatkan bahan baku untuk Pencetakan. | Hapus |  |  |
|  | 1. Ketentuan mengenai kemudahan dalam mendapatkan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27dan Pasal 29 ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | Hapus |  |  |
|  | Pasal 28 | Tetap |  |  |
|  | 1. Percetakan atau Usaha Digitalisasi wajib memiliki izin usaha. | Tetap |  |  |
|  |  | (2)Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan | Penambahan Substansi |  |
|  | 1. Percetakan atau Usaha Digitalisasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. | Hapus |  |  |
|  | 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: | Hapus | Sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Perizinan Usaha |  |
|  | * 1. peringatan tertulis; | Hapus |  |  |
|  | 1. penarikan produk dari peredaran; | Hapus |  |  |
|  | 1. denda; | Hapus |  |  |
|  | 1. pembekuan izin usaha; dan/atau | Hapus |  |  |
|  | 1. pencabutan izin usaha. | Hapus |  |  |
|  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Dewan Perbukuan. | Hapus |  |  |
|  | Bagian Kesepuluh  Penerbit | Tetap |  |  |
|  | Pasal 29 | Hapus | Tidak perlu diatur |  |
|  | 1. Penerbit berhak memperoleh kemudahan dalam mendapatkan bahan baku untuk penerbitan Buku. | Hapus | Tidak perlu diatur |  |
|  | 1. Ketentuan mengenai kemudahan dalam mendapatkan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | Hapus | Tidak perlu diatur |  |
|  | Pasal 30 | Tetap |  |  |
|  | 1. Penerbit wajib: | 1. Penerbit berkewajiban: |  |  |
|  | 1. memberikan royalti atas lisensi penerbitan dari harga bruto atau honorarium atas penyerahan hak cipta hasil karangan/tulisan penulis sesuai dengan kesepakatan para pihak; | * + - * 1. memberikan royalti atas lisensi penerbitan; | Diatur dalam Peraturan Menteri. |  |
|  | 1. memberikan honorarium atau gaji tetap, atau persentase royalti kepada penerjemah, penyadur, perancang grafis, penyunting, pembaca ahli, dan korektor sesuai dengan kesepakatan para pihak; | Hapus | Diatur dalam Peraturan Menteri. |  |
|  | 1. menyampaikan informasi yang akurat, terkini, dan periodik mengenai hasil penjualan buku kepada penulis, penerjemah, penyadur, dan ilustrator secara terbuka; | Hapus | Diatur dalam Peraturan Menteri. |  |
|  | 1. mencantumkan label harga pada sampul buku untuk buku teks; dan | Hapus | Diatur dalam Peraturan Menteri. |  |
|  | 1. memiliki izin usaha. | Tetap |  |  |
|  | 1. Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dikenai sanksi administratif. | Hapus | Sanksi Administratif diatur dalam BAB tersendiri. |  |
|  | 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: | Hapus |  |  |
|  | * 1. peringatan tertulis; | Hapus |  |  |
|  | 1. penarikan produk dari peredaran; | Hapus |  |  |
|  | 1. denda | Hapus |  |  |
|  | 1. pembekuan izin usaha; dan/atau; | Hapus |  |  |
|  | 1. pencabutan izin usaha. | Hapus |  |  |
|  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Dewan Perbukuan. | Hapus |  |  |
|  | Pasal 31 | Hapus |  |  |
|  | Pemberian royalti kepada penulis, penerjemah, penyadur, perancang grafis, penyunting, pembaca ahli, dan korektor dilakukan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan | Hapus | Diatur dalam Peraturan Menteri. |  |
|  | Pasal 32 | Hapus |  |  |
|  | Penulis, Penerjemah, Penyadur, Perancang Grafis, Penyunting, Pembaca Ahli, Dan Korektor dapat membentuk organisasi profesi dan membuat kode etik. | Hapus |  |  |
|  | Pasal 33 | Hapus |  |  |
|  | Percetakan atau Usaha Digitalisasi dan Penerbit dapat membentuk organisasi usaha dan membuat kode etik. | Hapus |  |  |
|  | BAB IV DEWAN PERBUKUAN Bagian Kesatu Nama, Kedudukan, dan Tugas | Hapus | 1. Urusan Pemerintahan sudah terbagi habis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 2. Bahwa fungsi-fungsi perbukuan merupakan kewenangan dari Kementerian. 3. Berdasarkan Perpres Nomor 176 Tahun 2014 Dewan Buku Nasional telah dibubarkan dan fungsinya dikembalikan ke Kementerian 4. RUU ini sebaiknya diarahkan tidak untuk membentuk lembaga baru melainkan untuk memperkuat fungsi lembaga yang telah ada. |  |
|  | Pasal 34 | Hapus |  |
|  | 1. Untuk melaksanakan Sistem Perbukuan dibentuk Dewan Perbukuan. | Hapus |  |
|  | 1. Dewan Perbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden. | Hapus |  |
|  | 1. Dewan Perbukuan berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. | Hapus |  |
|  | Pasal 35 | Hapus |  |
|  | Dewan Perbukuan berfungsi untuk membuat kebijakan serta melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan sistem perbukuan nasional | Hapus |  |
|  | Pasal 36 | Hapus |  |
|  | 1. Dewan Perbukuan beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur: | Hapus |  |
|  | 1. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, berasal dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan, perdagangan dan perindustrian; | Hapus |  |
|  | 1. penulis 1 (satu) orang; | Hapus |  |
|  | 1. penerbit 1 (satu) orang; | Hapus |  |
|  | 1. percetakan 1 (satu) orang; | Hapus |  |
|  | 1. distributor atau toko buku 1 (satu) orang; | Hapus |  |
|  | 1. masyarakat pendidikan 1 (satu) orang; dan | Hapus |  |
|  | 1. pustakawan 1 (satu) orang. | Hapus |  |
|  | 1. AnggotaDewan Perbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. | Hapus |  |
|  | 1. AnggotaDewan Perbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. | Hapus |  |
|  | 1. Masa keanggotaan Dewan Perbukuan selama 5 (lima) tahun terhitungsejak pengucapan sumpah/janji dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya | Hapus |  |
|  | Pasal 37 | Hapus |  |
|  | 1. Calon anggota Dewan Perbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden | Hapus |  |
|  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden | Hapus |  |
|  | Pasal 38 | Hapus |  |
|  | Dewan perbukuan berwenang untuk: | Hapus |  |
|  | * 1. menyusun kebijakan tata kelola perbukuan di tingkat nasional; | Hapus |  |
|  | * 1. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perbukuan; | Hapus |  |
|  | * 1. menetapkan strategi nasional perbukuan | Hapus |  |
|  | * 1. menetapkan standar, prosedur, dan norma perbukuan untuk menghasilkan buku yang berkualitas; | Hapus |  |
|  | * 1. mengawasi pelaksanaan sistem perbukuan nasional; dan | Hapus |  |
|  | * 1. memberikan penghargaan dan sanksi kepada orang perorangan dan/atau institusi perbukuan di bidang perbukuan. | Hapus |  |
|  | Pasal 39 | Hapus |  |
|  | Dewan Perbukuan bertugas: | Hapus |  |
|  | * 1. membangun sistem informasi perbukuan; | Hapus |  |
|  | * 1. menyusun pedoman peruntukan buku; | Hapus |  |
|  | * 1. memberikan pembinaan, pengembangan, pelatihan/pendidikan bagi pemangku kepentingan perbukuan; | Hapus |  |
|  | * 1. mendukung perlindungan hakcipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan; | Hapus |  |
|  | * 1. mempromosikan buku-buku indonesia di tingkat lokal, nasional, dan global; | Hapus |  |
|  | * 1. memfasilitasi kegiatan perbukuan yang berkaitan dengan kreativitas, sosialisasi, lomba/kompetisi, dan promosi baik di dalam maupun di luar negeri; | Hapus |  |
|  | * 1. melakukan pemberdayaan penerbit kecil berskala lokal dengan melakukan kemitraan melalui kerjasama dengan penerbit besar berskala nasional; | Hapus |  |
|  | * 1. memfasilitasi naskah buku berkualitas yang tidak memiliki nilai ekonomis untuk diterbitkan; | Hapus |  |
|  | * 1. memfasilitasi naskah buku yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, etika, kesusilaan, dan budaya untuk diterbitkan; | Hapus |  |
|  | * 1. memfasilitasi naskah buku yang berkualitas, baik di daerah maupun nasional, yang tidak tertampung oleh penerbit nasional untuk diterbitkan. | Hapus |  |
|  | * 1. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat tehadap penyelenggaraan perbukuan; | Hapus |  |
|  | * 1. menetapkan harga eceran tertinggi buku berdasarkan pertimbangan pemangkukepentingan bidang perbukuan; | Hapus |  |
|  | * 1. menerima dan menindaklanjuti pengaduan tentang masalah perbukuan dari Setiap orang; | Hapus |  |
|  | * 1. memfasilitasi penulis, penerjemah, penyadur, perancang grafis, penyunting, pembaca ahli, korektor, dan penerbit untuk membentuk asosiasi dan menyusun kode etik profesinya; | Hapus |  |
|  | * 1. memberikan penghargaan kepada Penulis, Penerbit, Penerjemah, Penyadur, Perancang Grafis, Penyunting, Pembaca Ahli, Penerbit, Percetakan, dan Distributor yang berprestasi; | Hapus |  |
|  | * 1. melakukan pengawasan terhadap buku pendidikan yang tidak sesuai dengan standar, kaedah, dan etika penulisan buku; | Hapus |  |
|  | * 1. menerbitkan buku terjemahan atau saduran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan | Hapus |  |
|  | * 1. melakukan kerja sama dengan instansi Pemerintah dan masyarakat di bidang perbukuan. | Hapus |  |
|  | Pasal 40 | Hapus |  |
|  | 1. Untuk kelancaran pelaksanaan wewenangan dan tugas, Dewan Perbukuan dibantu oleh sekretariat | Hapus |  |
|  | 1. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Dewan Perbukuan. | Hapus |  |
|  | Pasal 41 | Hapus |  |
|  | Pembiayaan pelaksanaan tugas Dewan Perbukuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Hapus |  |
|  | Pasal 42 | Hapus |  |
|  | Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur dan tata kerja organisasi, serta tugas dan wewenang Dewan Perbukuan diatur dengan Peraturan Presiden | Hapus |  |
|  | BAB V  WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH  Bagian Kesatu  Pemerintah | BAB V  WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH  Bagian Kesatu  Pemerintah |  |  |
|  | Pasal 43 | Tetap |  |  |
|  | * 1. Pemerintah berwenang: | Tetap |  |  |
|  | * 1. memfasilitasi dan membina penyelenggaraan Sistem Perbukuan; | Tetap |  |  |
|  | * 1. mengatur penghargaan terhadap Penulis, Penerbit, Penerjemah, Penyadur, Perancang Grafis, Penyunting, Pembaca Ahli, Penerbit, Percetakan, dan Distributor; | 1. memberikan penghargaan terhadap insan perbukuan yang telah berjasa dalam pengembangan Sistem Perbukuan Nasional; | Perubahan substansi |  |
|  | 1. memberikan insentif untuk mengembangkan tata niaga perbukuan; | 1. memfasilitasi pengembangan tata niaga perbukuan; |  |  |
|  | 1. memberikan fasilitas berupa pajak pertambahan nilai tidak dipungut atau pajak pertambahan nilai dibebaskan untuk buku umum atau buku pendidikan; dan | Tetap |  |  |
|  | 1. menyediakan anggaran melalui satuan pendidikan untuk pengadaan buku dalam rangka mendukung program wajib belajar; | Hapus | Cukup diatur dalam Permendikbud. |  |
|  |  | 1. menyusun kebijakan tata kelola perbukuan di tingkat nasional; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perbukuan; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. menetapkan strategi nasional perbukuan; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. menetapkan standar, prosedur, dan norma perbukuan untuk menghasilkan buku yang berkualitas; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. mengawasi pelaksanaan sistem perbukuan nasional; dan | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. memberikan penghargaan dan sanksi kepada orang perorangan dan/atau institusi perbukuan di bidang perbukuan. | Penambahan Substansi |  |
|  |  | (2a) Pemerintah bertugas: | Penambahan ayat baru |  |
|  |  | 1. membangun sistem informasi perbukuan; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. menyusun pedoman peruntukan buku; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. memberikan pembinaan, pengembangan, pelatihan/pendidikan bagi pemangku kepentingan perbukuan; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. mendukung perlindungan hakcipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. mempromosikan buku-buku indonesia di tingkat lokal, nasional, dan global; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. memfasilitasi kegiatan perbukuan yang berkaitan dengan kreativitas, sosialisasi, lomba/kompetisi, dan promosi baik di dalam maupun di luar negeri; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. melakukan pemberdayaan penerbit kecil berskala lokal dengan melakukan kemitraan melalui kerjasama dengan penerbit besar berskala nasional; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. memfasilitasi naskah buku berkualitas yang tidak memiliki nilai ekonomis untuk diterbitkan; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. memfasilitasi naskah buku yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, etika, kesusilaan, dan budaya untuk diterbitkan; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. memfasilitasi naskah buku yang berkualitas, baik di daerah maupun nasional, yang tidak tertampung oleh penerbit nasional untuk diterbitkan. | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat tehadap penyelenggaraan perbukuan; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. menetapkan harga eceran tertinggi buku berdasarkan pertimbangan pemangkukepentingan bidang perbukuan; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. menerima dan menindaklanjuti pengaduan tentang masalah perbukuan dari Setiap orang; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. memfasilitasi penulis, penerjemah, penyadur, perancang grafis, penyunting, pembaca ahli, korektor, dan penerbit untuk membentuk asosiasi dan menyusun kode etik profesinya; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. memberikan penghargaan kepada Penulis, Penerbit, Penerjemah, Penyadur, Perancang Grafis, Penyunting, Pembaca Ahli, Penerbit, Percetakan, dan Distributor yang berprestasi; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. melakukan pengawasan terhadap buku pendidikan yang tidak sesuai dengan standar, kaedah, dan etika penulisan buku; | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. menerbitkan buku terjemahan atau saduran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan | Penambahan Substansi |  |
|  |  | 1. melakukan kerja sama dengan instansi Pemerintah dan masyarakat di bidang perbukuan. | Penambahan Substansi |  |
|  | * 1. Pemerintah bertanggung jawab: | Tetap |  |  |
|  | * 1. menjamin terselenggaranya sistem perbukuan; | Tetap |  |  |
|  | 1. memberikan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh buku yang bermutu tanpa diskriminasi; | Tetap |  |  |
|  | 1. menjamin ketersediaan dan memberikan akses atas buku atau buku audio untuk yang berkebutuhan khusus dalam membaca; | 1. menjamin ketersediaan dan memberikan akses atas Buku atau buku elektronik untuk yang berkebutuhan khusus dalam membaca; | Perubahan Redaksional |  |
|  | 1. memfasilitasi penerbitan buku pendidikan untuk pendidikan kesetaraan dan keaksaraan; | 1. memfasilitasi Penerbitan Buku untuk pendidikan kesetaraan dan keaksaraan; | Perubahan Substansi |  |
|  | 1. memfasilitasi penerbitan hasil penelitian dalam bentuk buku; | Hapus | Diatur dalam Peraturan Menteri. |  |
|  | 1. memfasilitasi kegiatan perbukuan dengan melibatkan peran serta masyarakat; | Tetap |  |  |
|  | 1. menjamin ketersediaan bahan baku produksi buku dengan harga terjangkau; | Hapus | Diatur dalam Peraturan Menteri. |  |
|  | 1. menjamin ketersediaan kertas khusus dengan harga yang terjangkau untuk pencetakan buku pendidikan; | Hapus |  |  |
|  | 1. mengendalikan ketersediaan bahan baku produksi buku di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau; | Hapus |  |  |
|  | 1. menjamin stabilitas harga bahan baku produksi buku untuk menjaga keterjangkauan harga buku; | Hapus |  |  |
|  | 1. memberikan perlindungan terhadap karya intelektual penulis; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi penerbitan naskah dan dokumen langka untuk menjadi buku; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi penerbitan buku langka yang sangat diperlukan untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi penerjemahan buku pengetahuan umum yang berbahasa asing untuk mempermudah akses masyarakat dalam mengembangkan dan menambah pengetahuan | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi masyarakat untuk menerbitkan buku yang dapat membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memperkokoh martabat dan jati diri bangsa, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, serta toleransi antarumat beragama; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi program peningkatan minat baca dan menulis untuk menciptakan masyarakat belajar, masyarakat gemar membaca, dan masyarakat menulis; | Tetap |  |  |
|  | 1. membeli hak cipta Buku berkualitas yang diminati masyarakat untuk dapat diakses dan disebarluaskan secara bebas oleh masyarakat; | Hapus | Diatur dalam Peraturan Menteri. |  |
|  | 1. memfasilitasi Pendistribusian Buku secara merata dan dengan harga terjangkau | Hapus |  |  |
|  | 1. memfasilitasi Buku impor | Tetap |  |  |
|  | 1. meniadakan pajak impor untuk Buku yang digunakan untuk pendidikan;dan | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi pengembangan sistem informasi perbukuan | Tetap |  |  |
|  | Bagian Kedua | Tetap |  |  |
|  | Pemerintah Daerah | Tetap |  |  |
|  | Paragraf 1 | Tetap |  |  |
|  | Pemerintah Provinsi | Tetap |  |  |
|  | Pasal 44 | Tetap |  |  |
|  | Pemerintah Provinsi berwenang: | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi, dan membina penyelenggaraan Sistem Perbukuan di tingkat provinsi; | Tetap |  |  |
|  | 1. memberikan insentif untuk mengembangkan tata niaga perbukuan di tingkat provinsi; | Tetap |  |  |
|  | 1. menetapkan kebijakan perbukuan provinsi dengan memperhatikan kebijakan sistem perbukuan nasional; | Tetap |  |  |
|  | 1. menyediakan anggaran melalui satuan pendidikan untuk pengadaan buku dalam rangka mendukung program wajib belajar di tingkat provinsi; | Tetap |  |  |
|  | 1. membentuk badan hukum penerbitan buku untuk menerbitkan buku; dan | Hapus | Tidak perlu diatur |  |
|  | 1. memberikan penghargaan kepada Penulis, Penerjemah, Penyadur, Perancang Grafis, Penyunting, Pembaca Ahli, Penerbit, Percetakan, dan Distributor yang berprestasi prestasi. | 1. memberikan penghargaan kepada insan perbukuan yang berprestasi | Perubahan redaksional |  |
|  |  | 1. melakukan pengawasan penerbitan dan penggunaan buku | Penambahan rumusan |  |
|  | (2) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab: | Tetap |  |  |
|  | 1. menjamin terselenggaranya sistem perbukuan; | * 1. menjamin terselenggaranya Sistem Perbukuan Nasional di tingkat provinsi | Perubahan Substansi |  |
|  | 1. memberikan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh buku yang bermutu tanpa diskriminasi; | Tetap |  |  |
|  | 1. memberikan akses atas Buku atau buku audio untuk yang berkebutuhan khusus dalam membaca; | 1. memberikan akses atas Buku untuk yang berkebutuhan khusus; | Perubahan redaksional |  |
|  | 1. menerbitkan buku yang dapat membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memperkokoh martabat dan jati diri bangsa, menumbuhkan rasa persatuan, serta toleransi antarumat beragama; | 1. memfasilitasi penerbitan buku yang dapat membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memperkokoh martabat dan jati diri bangsa, menumbuhkan rasa persatuan, serta toleransi antarumat beragama; | Perubahan redaksional |  |
|  | 1. menerbitkan buku berbahasa daerah; | 1. memfasilitasi penerbitan buku berbahasa daerah; | Perubahan redaksional |  |
|  | 1. menerjemahkan buku pengetahuan yang berbahasa asing untuk mempermudah akses masyarakat dalam mengembangkan dan menambah pengetahuan; | 1. menerjemahkan buku | Penerjemahan buku dilakukan untuk buku bahasa asing ke bahasa Indonesia maupun bahasa daerah atau bahasa Indonesia ke bahasa asing (masuk ke dalam Penjelasan) |  |
|  | 1. membeli hak cipta Buku dari masyarakat dan mempublikasikannya; | Hapus |  |  |
|  | 1. memfasilitasi Penerbitan Buku Pendidikan untuk pendidikan kesetaraan dan keaksaraan; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi Penerbitan hasil penelitian dalam bentuk Buku; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi kegiatan perbukuan dengan melibatkan peran serta masyarakat; | Tetap |  |  |
|  | 1. mendukung ketersedian bahan baku produksi Buku dengan harga terjangkau; | Hapus |  |  |
|  | 1. menjamin ketersediaan kertas khusus dengan harga yang terjangkau untuk pencetakan buku pendidikan; | Hapus | Penentuan jenis kertas khusus akan diatur dalam PP |  |
|  | 1. mengusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan penerbitan naskah dan dokumen langka untuk menjadi Buku; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi penerbitan buku langka yang sangat diperlukan untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi masyarakat untuk menerbitkan Buku yang dapat membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memperkokoh jati diri bangsa, dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, serta toleransi antar umat beragama; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi program peningkatan minat baca dan menulis untuk menciptakan masyarakat belajar, masyarakat gemar membaca, dan masyarakat gemar menulis; | Tetap |  |  |
|  | 1. membeli hak cipta Buku berkualitas yang diminati masyarakat untuk dapat diakses dan disebarluaskan secara bebas oleh masyarakat; | Tetap |  |  |
|  | 1. melakukan pengawasan terhadap buku pendidikan yang tidak sesuai dengan standar, kaedah dan etika penulisan buku; | Tetap |  |  |
|  | 1. membentuk badan hukum untuk menerbitkan Buku; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi pendistribusian buku secara merata dan dengan harga terjangkau;dan | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi sistem informasi perbukuan di tingkat provinsi | Tetap |  |  |
|  | Paragraf 2  Pemerintah Kabupaten/Kota | Tetap |  |  |
|  | Pasal 45 | Tetap |  |  |
|  | (1)Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang: | Tetap |  |  |
|  | * 1. memfasilitasi dan membina penyelenggaraan sistem perbukuan di tingkat kabupaten/kota; | Tetap |  |  |
|  | * 1. memberikan insentif untuk mengembangkan tata niaga perbukuan di tingkat kabupaten/kota; | Tetap |  |  |
|  | * 1. menetapkan kebijakan perbukuan kabupaten/kota dengan memperhatikan pertimbangan kebijakan sistem perbukuan nasional dan kebijakan sistem perbukuan provinsi; | Tetap |  |  |
|  | * 1. menyediakan anggaran melalui satuan pendidikan untuk pengadaan buku dalam rangka mendukung program wajib belajar di tingkat kabupaten/kota; | Tetap |  |  |
|  | * 1. membentuk badan hukum untuk menerbitkan buku; dan | Tetap |  |  |
|  | * 1. memberikan penghargaan kepada Penulis, Penerjemah, Penyadur, Perancang Grafis, Penyunting, Pembaca Ahli, Penerbit, Percetakan, dan Distributor yang berprestasi. | Tetap |  |  |
|  | (2) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab: | Tetap |  |  |
|  | * + - * 1. menjamin terselenggaranya sistem perbukuan; | Tetap |  |  |
|  | * + - * 1. memberikan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh buku yang bermutu tanpa diskriminasi; | Tetap |  |  |
|  | * + - * 1. memberikan akses atas buku atau buku audio untuk yang berkebutuhan khusus dalam membaca; | Tetap |  |  |
|  | * + - * 1. menerbitkan buku yang dapat membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memperkokoh martabat dan jati diri bangsa, menumbuhkan rasa persatuan, serta toleransi antarumat beragama; | Tetap |  |  |
|  | * + - * 1. menerbitkan buku berbahasa daerah; | Tetap |  |  |
|  | * + - * 1. memfasilitasi kegiatan perbukuan dengan melibatkan peran serta masyarakat; | Tetap |  |  |
|  | * + - * 1. mendukung ketersediaan bahan baku produksi buku dengan harga terjangkau; | Hapus |  |  |
|  | * + - * 1. menjamin ketersediaan kertas khusus dengan harga yang terjangkau untuk pencetakan Buku Pendidikan; | Hapus |  |  |
|  | 1. memfasilitasi Penerbitan Buku Pendidikan untuk pendidikan kesetaraan dan keaksaraan; | 1. memfasilitasi Penerbitan Buku untuk pendidikan kesetaraan dan keaksaraan; | Perubahan Substansi |  |
|  | 1. memfasilitasi Penerbitan hasil penelitian dalam bentuk Buku; | Tetap |  |  |
|  | 1. mengusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan penerbitan naskah dan dokumen langka untuk menjadi Buku; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi penerbitan buku langka yang sangat diperlukan untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi masyarakat untuk menerbitkan Buku yang dapat membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memperkokoh jati diri bangsa, dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, serta toleransi antar umat beragama; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi masyarakat untuk menerbitkan Buku berbahasa daerah; | Tetap |  |  |
|  | 1. membeli hak cipta Buku berkualitas yang diminati masyarakat untuk dapat diakses dan disebarluaskan secara bebas oleh masyarakat; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi program peningkatan minat baca dan menulis untuk menciptakan masyarakat belajar, masyarakat gemar membaca, dan masyarakat gemar menulis; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi Pendistribusian Buku secara merata dan dengan harga terjangkau; | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi tumbuhnya toko buku;dan | Tetap |  |  |
|  | 1. memfasilitasi sistem informasi perbukuan di tingkat kabupaten/kota | Tetap |  |  |
|  | BAB VI  PENULISAN NASKAH BUKU  Bagian Kesatu  Umum | Tetap |  |  |
|  | Pasal 46 | Tetap |  |  |
|  | Penulisan naskah Buku meliputi penulisan, penerjemahan, penyaduran, pengilustrasian, perancangan tata letak, dan penyuntingan. | Tetap |  |  |
|  | Pasal 47 | Tetap |  |  |
|  | Naskah Buku meliputi karangan asli, terjemahan, saduran, dan ciptaan lain. | 1. Naskah Buku meliputi karangan asli, terjemahan, dan saduran. | Frasa “ciptaan lain dihapus karena tidak sebanding dengan karangan asli, terjemahan, saduran. Ciptaan lain merupakan salah satu muatan dalam naskah buku |  |
|  |  | 1. Naskah buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat ilustrasi. | Penambahan substansi |  |
|  | Bagian Kedua  Penulisan | Tetap |  |  |
|  | Pasal 48 | Hapus |  |  |
|  | 1. Penulisan meliputi: | Hapus | Klasifikasi Jenis buku Pasal 5 ditiadakan |  |
|  | * 1. Penulisan Buku Umum; dan | Hapus |  |  |
|  | * 1. Penulisan Buku Pendidikan. | Hapus |  |  |
|  | 1. Penulisan dilakukan Penulis atas inisiatif sendiri atau pesanan dari Penerbit. | Tetap |  |  |
|  | Pasal 49 | Tetap |  |  |
|  | * + 1. Penulisan Buku harus sesuai dengan standar, kaidah, dan etika penulisan Buku. | 1. Penulisan Buku harus sesuai dengan standar penulisan Buku. | Perbaikan rumusan: kaidah dan etika bagian dari standar |  |
|  | * + 1. Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan etika penulisan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dewan Perbukuan. | 1. Ketentuan mengenai standarpenulisan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | Perubahan Substansi  **Catatan:**  Standar, kaidah, etika penulisan buku akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, buku untuk pendidikan akan diatur dalam Peraturan Menteri. |  |
|  | Pasal 50 | Tetap |  |  |
|  | 1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan dana untuk pembuatan penulisan Buku yang dilakukan oleh Penulis dalam bentuk hibah. | Tetap |  |  |
|  | 1. Pemberian bantuan dana untuk pembuatan penulisan buku dalam bentuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | Tetap |  |  |
|  | Pasal 51 | Tetap |  |  |
|  | Naskah hasil penerjemahan harus sesuai dengan makna dalam bahasa aslinya. | Tetap |  |  |
|  | Pasal 52 | Tetap |  |  |
|  | Buku yang diterjemahkan untuk keperluan pendidikan diutamakan untuk meningkatkan akhlak mulia, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kebudayaan. | Penerjemahan buku dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya diutamakan untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi budaya untuk membentuk karakter manusia Indonesia. | Perubahan redaksional |  |
|  | Bagian Keempat  Penyaduran | Hapus | Tidak perlu diatur terlalu teknis |  |
|  | Pasal 53 | Hapus |  |  |
|  | Naskah hasil penyaduaran harus sesuai dengan makna yang dimaksud dalam bahasa aslinya. | Hapus |  |  |
|  | Pasal 54 | Hapus |  |  |
|  | Buku yang disadur untuk keperluan pendidikan diutamakan untuk meningkatkan akhlak mulia, pendidikan karakter, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kebudayaan. | Hapus |  |  |
|  | Bagian kelima  Pengilustrasian | Hapus | Tidak perlu diatur terlalu teknis |  |
|  | Pasal 55 | Hapus |  |  |
|  | 1. Pengilustrasian Buku mencakup pengilustrasian dari segi sampul dan isi Buku. | Hapus |  |  |
|  | 1. Pengilustrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan peruntukan Buku. | Hapus |  |  |
|  | Bagian Keenam  Penyuntingan | Hapus | Tidak perlu diatur terlalu teknis |  |
|  | Pasal 56 | Hapus |  |  |
|  | Naskah hasil penyuntingan harus sesuai dengan makna naskah aslinya. | Hapus |  |  |
|  | Pasal 57 |  |  |  |
|  | Penyuntingan naskah Buku dapat dilakukan dari segi gagasan, bahasa, dan ilustrasi tanpa mengubah makna aslinya. | Hapus |  |  |
|  | Bagian Ketujuh  Perancangan Tata Letak | Hapus | Tidak perlu diatur terlalu teknis |  |
|  | Pasal 58 | Hapus |  |  |
|  | 1. Perancangan tata letak Buku mencakup perancangan dari segi perwajahan, penampilan fisik, dan tipografi Buku. | Hapus |  |  |
|  | 1. Perancangan tata letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peruntukan Buku. | Hapus |  |  |
|  | BAB VII  PENCETAKAN ATAU DIGITALISASI | Tetap |  |  |
|  | Pasal 59 | Tetap |  |  |
|  | Pencetakan atau digitalisasi dilakukan setelah naskah buku selesai melalui tahapan peyuntingan atau pengeditan. | Tetap |  |  |
|  | Pasal 60 | Tetap |  |  |
|  | 1. Pencetakan Buku Pendidikan harus menggunakan kertas khusus yang ditetapkan oleh Menteri. | 1. Pencetakan Buku menggunakan kertas dengan harga yang terjangkau. | Perubahan Substansi |  |
|  | 1. Kertas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk kepentingan lain selain untuk Buku Pendidikan. | Hapus | Pemerintah tidak dapat menyediakan kertas khusus |  |
|  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | Perubahan redaksional |  |
|  | Pasal 61 |  |  |  |
|  | 1. Untuk memudahkan masyarakat memperoleh dan mengakses buku teks, perlu dilakukan digitalisasi buku teks dan dipublikasikan melalui media elektronik. | 1. Untuk memudahkan masyarakat memperoleh dan mengakses buku, dapat dilakukan dengan digitalisasi buku dan dipublikasikan melalui media elektronik. | Perubahan redaksional |  |
|  | 1. Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh secara gratis dan digandakan. | 1. Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh secara gratis dan digandakan. | Perubahan redaksional |  |
|  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai digitalisasi Buku Pendidikan diatur oleh Menteri. | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai digitalisasi, publikasi, dan penggandaan diatur dalam Peraturan Menteri. | Perubahan redaksional |  |
|  | BAB VIII  PENERBITAN | Tetap |  |  |
|  | Pasal 62 | Tetap |  |  |
|  | (1) Buku diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: | Tetap |  |  |
|  |  | Isi buku memenuhi ketentuan Pasal 4a | Penambahan substansi (sesuai penambahan pada Pasal 4a). |  |
|  | 1. terdapat perjanjian tertulis antara Penulis dan Penerbit yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing; | Tetap |  |  |
|  |  | b.memperhatikan ekosistem perbukuan. | Penambahan substansi  Penjelasan:  Ekosistem perbukuan adalah pelibatan pelaku dan pemangku kepentingan di bidang perbukuan. |  |
|  | 1. penyuntingan yang meliputi penyuntingan materi, penyuntingan bahasa, dan penyuntingan grafis oleh penyunting tanpa mengubah isi naskah; | Hapus | Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur oleh Badan. |  |
|  | 1. memuat judul, nama Penulis dan/atau Penerjemah dan/atau Penyadur, Perancang Grafis, Penyunting, Perancang Tata Letak, Penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan, nomor buku standar internasional, dan katalog dalam terbitan; dan | Hapus | Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur oleh Badan |  |
|  | 1. tidak mengandung diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan, pornografi, kekerasan dan/atau hasutan kepada pihak lain. | Tetap |  |  |
|  | (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: | Hapus |  |  |
|  | 1. buku teks menggunakan kertas yang telah dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan telah memenuhi kelayakan sesuai peraturan perundang-undangan | Hapus | Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri |  |
|  | 1. buku pengayaan atau pelengkap, buku panduan pendidik, buku referensi, dan buku sumber menggunakan kertas yang telah dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) | Hapus | Pemerintah tidak dapat menyediakan kertas khusus |  |
|  |  | Ketentuan lain yang berkaitan dengan persyaratan penerbitan buku diatur dalam Peraturan Menteri. |  |  |
|  | Pasal 63 | Tetap |  |  |
|  | Penerbitan Buku oleh pihak asing di Indonesia wajib dilakukan melalui kerjasama dengan penerbit yang didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia | Tetap |  |  |
|  | Pasal 64 | Tetap |  |  |
|  | Penerbit berbadan hukum milik Pemerintah dan/atau berbadan hukum milik Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Buku | Tetap |  |  |
|  | Pasal 65 | Tetap |  |  |
|  | 1. Penerbitan Buku Pendidikan untuk pendidikan tinggi dapat dikelola oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. | 1. Penerbitan Buku untuk pendidikan tinggi dapat dikelola oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. | Perubahan Substansi |  |
|  | 1. Penerbitan Buku Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 1. Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Perubahan Substansi |  |
|  | Pasal 66 | Tetap |  |  |
|  | Penerbit wajib mencantumkan keterangan peruntukan Buku pada sampul sisi luar Buku | (1)Penerbit wajib mencantumkan keterangan peruntukan Buku pada sampul sisi luar Buku |  |  |
|  |  | (2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenai Sanksi administrasi berupa:  a. teguran lisan maupun tertulis;  b. denda; dan/atau  c. penarikan Produk dari peredaran; |  |  |
|  |  | (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. |  |  |
|  | Pasal 67 | Tetap |  |  |
|  | Penerbit wajib mencantumkan harga eceran tertinggi dan tahun Penerbitan pada sisi sampul luar Buku Pendidikan. | Penerbit wajib mencantumkan harga eceran tertinggi dan tahun penerbitan pada sisi sampul luar Buku. | Perubahan Substansi |  |
|  | BAB IX  PENDISTRIBUSIAN | Tetap |  |  |
|  | Pasal 68 | Hapus |  |  |
|  | 1. Buku Umum dan Buku Pendidikan menjadi bagian dalam koleksi Perpustakaan. | Hapus | Tidak dalam konteks pendistribusian buku.  Sudah diatur dalam UU Perpustakaan Nomor 43 tahun 2007 |  |
|  | 1. Perpustakaan berfungsi menyebarluaskan informasi Buku Umum dan Buku Pendidikan kepada pemustaka. | Hapus | Tidak dalam konteks pendistribusian buku.  Sudah diatur dalam UU Perpustakaan Nomor 43 tahun 2007 |  |
|  | 1. Layanan informasi Buku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Hapus | Tidak dalam konteks pendistribusian buku.  Layanan informasi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah |  |
|  |  | 1. Pendistribusian buku dilakukan untuk menjamin ketersedian buku secara merata dan/atau dengan harga terjangkau. | Penambahan substansi |  |
|  |  | 1. Pendistribusian buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat | Penambahan substansi |  |
|  |  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | Penambahan substansi |  |
|  | Pasal 69 | Tetap |  |  |
|  | 1. Penjualan Buku dilarang melebihi harga eceran tertinggi. | (1) Penjualan buku teks dilarang melebihi harga eceran tertinggi. |  |  |
|  | 1. Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Perbukuan atas usulan asosiasi penerbit dan asosiasi distributor. | 1. Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian yang berwenang. |  |  |
|  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dewan Perbukuan. | Hapus | Sudah dimuat pada ayat (2) |  |
|  | Pasal 70 | Tetap |  |  |
|  | Penjualan Buku secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | Tetap |  |  |
|  | Pasal 71 | Tetap |  |  |
|  | 1. Pemerintah mendistribusikan buku teks kepada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara langsung. | 1. Pemerintah dan pemerintah daerah mendistribusikan buku teks kepada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. | Perubahan substansi |  |
|  | 1. Buku teks yang didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya. | 1. Pendistribusian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Pemerintah/ pemerintah daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. |  |  |
|  | 1. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | Hapus |  |  |
|  | Pasal 72 | Tetap |  |  |
|  | Penerbit dilarang mendistribusikan untuk penjualan buku teks secara langsung ke satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. | Penerbit dilarang melakukan penjualan buku teks pelajaran ke satuan pendidikan. | Perubahan substansi |  |
|  | Pasal 73 | Hapus |  |  |
|  | 1. Penjualan buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik, didistribusikan melalui toko buku. | Hapus | Sudah diatur di pasal 68 ayat (2) |  |
|  | 1. Dalam hal suatu daerah tidak memiliki toko buku dalam radius 25 (dua puluh lima) kilometer atau lebih, penjualan buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik, dapat dilakukan setiap orang ke satuan pendidikan. | (2)Dalam hal suatu kabupaten/kota tidak memiliki toko buku maka pendistribusian buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik ke satuan pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. |  |  |
|  | Pasal 74 | Hapus |  |  |
|  | Penjualan Buku Umum dapat didistribusikan melalui toko buku atau bukan toko buku. | Hapus |  |  |
|  | Pasal 75 | Hapus |  |  |
|  | 1. Distributor yang mendistribusikan penjualan Buku Umum dan Buku Pendidikan harus memiliki izin usaha. | Hapus | Sudah diatur pada Pasal 68 ayat (3) usulan |  |
|  | 1. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | Hapus |  |  |
|  | BAB X  PENGGUNAAN | Tetap |  |  |
|  | Pasal 76 | Tetap |  |  |
|  | Penggunaan Buku Umum harus sesuai dengan klasifikasi peruntukannya. | Hapus | Tidak perlu diatur |  |
|  | Pasal 77 | Tetap |  |  |
|  | * + 1. Buku Pendidikan wajib digunakan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. | 1. Buku teks pelajaran wajib digunakan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. | Perubahan substansi |  |
|  | * + 1. Selain Buku Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik dan peserta didik dapat menggunakan Buku Umum. | 1. Selain buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik dan peserta didik dapat menggunakan Buku lain. | Perubahan substansi |  |
|  | Pasal 78 | Tetap |  |  |
|  | 1. Penggunaan Buku Pendidikan tertentu pada satuan pendidikan dasar dan menengah harus memenuhi standar, prosedur, dan norma Buku Pendidikan yang ditetapkan oleh Dewan Perbukuan. | 1. Penggunaan buku teks pelajaran harus melalui penilaian dengan mengacupada standar, prosedur, dan norma buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan kewenangannya | Perubahan substansi |  |
|  | 1. Standar, prosedur, dan norma Buku Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan. | 1. Standar, prosedur, dan norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi/materi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan. | Perubahan substansi |  |
|  | 1. Hasil penilaian tentang standar, prosedur, dan norma buku beserta alasannya dipublikasikan oleh Dewan Perbukuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tahun ajaran baru. | 1. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta alasannya dipublikasikan oleh Menteri. | Perubahan substansi |  |
|  | 1. Dalam hal Dewan Perbukuan belum mempublikasikan kelayakan pakai standar, prosedur, dan norma Buku Pendidikan mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rapat pendidik pada satuan pendidikan menggunakan Buku Pendidikan yang berlaku sebelumnya. | 1. Dalam hal Menteri belum mempublikasikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka satuan pendidikan mengunakan buku teks pelajaran yang berlaku sebelumnya. | Perubahan substansi |  |
|  | 1. Pemilihan Buku Pendidikan oleh rapat pendidik pada setiap satuan pendidikan harus mempertimbangkan mutu Buku Pendidikan dan kesesuaiannya dengan standar nasional pendidikan. | 1. Pemilihan buku teks pelajaran pada setiap satuan pendidikan harus mempertimbangkan mutu buku dan kesesuaiannya dengan standar nasional pendidikan. | Perubahan redaksional |  |
|  | Pasal 79 | Tetap |  |  |
|  | Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian tentang standar, prosedur, dan norma Buku Pendidikan tertentu pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah diatur dengan Peraturan Kepala Dewan Perbukuan. | Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaiandan pemilihan buku teks pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri. | Perubahan substansi |  |
|  | Pasal 80 | Hapus | Sudah diatur didalam Pasal 79 |  |
|  | 1. Buku Pendidikan memiliki batasan masa pakai paling singkat 5 (lima) tahun. | Hapus |  |  |
|  | 1. Masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. | Hapus |  |  |
|  | 1. Penggunaan masa pakai Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan sebelum berakhirnya masa pakai apabila: | Hapus |  |  |
|  | * 1. terdapat perubahan substantif dalam standar isi dan/atau standar kompetensi lulusan; | Hapus |  |  |
|  | * 1. dinyatakan tidak layak pakai oleh menteri berdasarkan hasil kajian dewan perbukuan; atau | Hapus |  |  |
|  | * 1. dilarang peredarannya melalui putusan pengadilan. | Hapus |  |  |
|  | BAB XI  PENGADAAN | Tetap |  |  |
|  | Pasal 81 | Tetap |  |  |
|  | 1. Pengadaan Buku dapat dilakukan melalui: | Tetap |  |  |
|  | * 1. penerbitan; dan | Tetap |  |  |
|  | * 1. impor. | Tetap |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan tentang impor buku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. |  |  |
|  | Pasal 82 | Tetap |  |  |
|  | 1. Pengadaan Buku Pendidikan di setiap satuan pendidikan dasar dan menengah jalur formal dan pendidikan kesetaraan jalur nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. | 1. Pengadaan buku teks pelajaran untuk keperluan pembelajaran di setiap satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. | Perubahan substansi |  |
|  | 1. Pengadaan Buku Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. | Hapus | Pengadaan buku oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah sudah pasti menggunakan anggaran APBN dan APBD. |  |
|  | 1. Pengadaan Buku Pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat dapat melalui swadaya masyarakat. | 1. Pengadaan buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui swadaya masyarakat. | Perubahan substansi |  |
|  | Pasal 83 | Hapus | Sudah diatur dalam UU tentang Perpustakaan |  |
|  | Dana pengadaan buku teks untuk keperluan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. | Hapus |  |  |
|  | Pasal 84 | Tetap |  |  |
|  | Pemerintah, Pemerintah daerah, perpustakaan, dan/atau pusat sumber belajar di satuan pendidikan dapat melakukan pengadaan buku dalam bentuk hibah untuk memperkaya koleksi perpustakaan satuan pendidikan. | Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan pengadaan buku dalam bentuk hibah. | Perubahan redaksional |  |
|  | BAB XII  PERAN SERTA MASYARAKAT | Tetap |  |  |
|  | Pasal 85 | Tetap |  |  |
|  | 1. Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Sistem Perbukuan dan pengendalian mutu perbukuan nasional. | 1. Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Sistem Perbukuan Nasional. | Perubahan Substansi |  |
|  | 1. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui instansi yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi pengelolaan pendidikan. | Hapus | Sudah terwadahi pada ayat (1) |  |
|  | 1. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: | Tetap |  |  |
|  | * 1. mengikuti program kegemaran membaca dan menulis buku yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat; | Tetap |  |  |
|  |  | 1. menyampaikan aspirasi dengan penuh tanggung jawab. |  |  |
|  | * 1. mengawasi pelaksanaan sistem perbukuan; | 1. mengawasi pelaksanaan Sistem Perbukuan Nasional; | Perubahan Substansi |  |
|  | * 1. pembiayaan kegiatan perbukuan; | Tetap |  |  |
|  | * 1. memberikan penghargaan kepada penulis, penerjemah, penyadur, perancang grafis, penyunting, pembaca ahli, penerbit, percetakan, dan distributor yang berprestasi. | Tetap |  |  |
|  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. | Tetap |  |  |
|  |  | BAB XII A  PENGAWASAN | Penambahan BAB Baru |  |
|  |  | Pasal 85A | Penambahan Pasal Baru |  |
|  |  | 1. Pemerintah, pemerintah daerah, insan perbukuan, masyarakat melakukan pengawasan atas Sistem Perbukuan Nasional. | Penambahan substansi |  |
|  |  | 1. Pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar Sistem Perbukuan Nasional terselenggara dengan baik. | Penambahan substansi |  |
|  |  | 1. Pengawasan terhadap substansi buku di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM dilakukan oleh Kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   ***Penjelasan ayat (3):***  *Pengawasan untuk melakukan pencegahan tindak pidana dalam rangka mendukung penegakkan hukum baik preventif maupun represif di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM agar terciptanya ketertiban dan ketentraman umum.* | Penambahan substansi |  |
|  |  | 1. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi. | Penambahan substansi |  |
|  |  | 1. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Penambahan substansi |  |
|  | BAB XIII  KETENTUAN PIDANA | Tetap | Perubahan substansi. |  |
|  | Pasal 86 | Tetap |  |  |
|  | Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Pasal 66, dan Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). | Penerbit yang tidak mencantumkan harga eceran tertinggi dan tahun penerbitan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. | Perubahan substansi |  |
|  | Pasal 87 | Tetap |  |  |
|  | Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). | Setiap orang yang menjual buku teks pelajaran melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak  Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. | Perubahan substansi |  |
|  | Pasal 88 | Tetap |  |  |
|  | Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). | Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah. |  |  |
|  | BAB XIV  KETENTUAN PENUTUP | Tetap |  |  |
|  | Pasal 89 | Tetap |  |  |
|  | Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. | Tetap |  |  |
|  | Pasal 90 | Hapus |  |  |
|  | Dewan Perbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. | Hapus | Perubahan substansi |  |
|  | Pasal 91 | Tetap |  |  |
|  | Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbukuan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. | Tetap |  |  |
|  | Pasal 92 | Tetap |  |  |
|  | Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Tetap |  |  |
|  | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe­ngun­da­ng­­an Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. | Tetap |  |  |
|  | Disahkan di Jakarta  Pada tanggal ...  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  JOKO WIDODO  Diundangkan di Jakarta  Pada tanggal ...  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA,  **YASONNA H. LAOLY**  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... | Tetap |  |  |